



Urgensi Pendidikan Politik dalam Islam

Husni Mubarak

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

husni3789@gmail.com

Abstract

Ideally, political education in Islam serves as a means to develop the political awareness of the Muslim community based on the values of justice, trustworthiness, and social responsibility, so that politics is understood as a form of service aimed at achieving public welfare. However, in reality, Islamic political education has not been implemented optimally, as indicated by the low level of political literacy, the prevalence of political pragmatism, and the tendency to separate Islamic values from political practices. This condition has resulted in a gap between the ideal teachings of Islam and the reality of contemporary political life. This study aims to examine the urgency of political education in Islam and its role in shaping political awareness and ethical political behavior among Muslims. The research employs a library-based study with a qualitative approach, using descriptive-analytical methods to examine primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources including scholarly books and academic journal articles. The findings indicate that political education in Islam plays a strategic role in integrating moral and spiritual values into political life and offers a solution to the ethical crisis and low political awareness within the Muslim community.

Keywords: Education, Political Awareness, Social Justice.

Abstrak

Idealnya, pendidikan politik dalam Islam berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesadaran politik umat Islam berdasarkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial, sehingga politik dipahami sebagai bentuk pengabdian yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, pendidikan politik Islam belum terlaksana secara optimal,

yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat literasi politik, maraknya pragmatisme politik, serta kecenderungan memisahkan nilai-nilai Islam dari praktik politik. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara ajaran ideal Islam dan realitas kehidupan politik kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendidikan politik dalam Islam serta perannya dalam membentuk kesadaran politik dan perilaku politik yang etis di kalangan umat Islam. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui metode deskriptif-analitis untuk mengkaji sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa buku-buku ilmiah dan artikel jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik dalam Islam memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam kehidupan politik serta menawarkan solusi terhadap krisis etika dan rendahnya kesadaran politik di tengah masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Pendidikan, Kesadaran Politik, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan elemen penting dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dinamika global yang ditandai oleh perubahan politik yang cepat, kompleksitas kepentingan, serta perkembangan teknologi informasi, pendidikan politik menjadi kebutuhan mendasar agar masyarakat tidak bersikap apatis maupun terjebak dalam praktik politik yang tidak etis. Politik tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga menyangkut nilai, moral, dan arah kehidupan bersama. Oleh karena itu, pendidikan politik berperan strategis dalam membangun budaya politik yang beradab, partisipatif, dan bertanggung jawab. Tanpa pendidikan politik yang memadai, masyarakat cenderung mudah terprovokasi, kehilangan daya kritis, dan terjebak dalam pragmatisme politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan politik yang sehat.

Dalam perspektif Islam, politik tidak dipandang sebagai wilayah yang terpisah dari nilai-nilai agama. Islam sebagai ajaran yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk urusan sosial dan politik. Konsep kekhalifahan, keadilan, amanah, dan musyawarah merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menegaskan bahwa politik dalam Islam memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat. Pendidikan politik dalam Islam bertujuan membentuk kesadaran umat agar memahami politik sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial, bukan sebagai alat kepentingan

pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, pendidikan politik Islam tidak hanya menekankan aspek pengetahuan politik, tetapi juga pembentukan etika dan tanggung jawab moral dalam berpolitik. Kesadaran politik umat yang berlandaskan nilai Islam menjadi kunci terciptanya kehidupan politik yang adil dan bermartabat.

Idealnya, pendidikan politik dalam Islam mampu melahirkan umat yang memiliki kesadaran politik yang kritis, etis, dan bertanggung jawab, serta menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai pedoman dalam kehidupan politik. Pendidikan politik Islam diharapkan membentuk sikap politik yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa pendidikan politik Islam masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Politik sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor dan terpisah dari ajaran agama, sementara praktik politik di kalangan umat Islam kerap diwarnai oleh pragmatisme, konflik kepentingan, serta politisasi agama. Rendahnya literasi politik yang berlandaskan nilai Islam menyebabkan umat mudah terpolarisasi dan kehilangan orientasi moral dalam berpolitik. Kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dan realitas praktik politik inilah yang menjadi masalah utama dalam kajian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendidikan politik dalam Islam sebagai upaya membangun kesadaran politik umat yang berlandaskan nilai moral dan keadilan. Penelitian ini secara khusus berupaya menganalisis peran pendidikan politik Islam dalam membentuk etika politik serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di tengah dinamika politik modern. Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang pendidikan politik Islam serta memberikan rujukan konseptual bagi pengembangan model pendidikan politik yang relevan dengan konteks kekinian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pendidik, pemangku kebijakan, dan tokoh masyarakat dalam membangun budaya politik yang berkeadaban, bermoral, dan bertanggung jawab.

Kajian mengenai urgensi pendidikan politik dalam Islam bukanlah tema yang sepenuhnya baru dalam khazanah keilmuan Islam kontemporer. Rofik Aksan, dalam karyanya yang berjudul "*Kekuasaan dan Politik Lembaga Pendidikan Islam*," membahas secara mendalam relasi antara kekuasaan politik dan penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam. Ia menyoroti bagaimana kebijakan politik negara berpengaruh terhadap arah, otonomi, dan praktik pendidikan Islam, baik dalam aspek regulasi, kurikulum, maupun manajemen kelembagaan (Aksan, 2022). Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan yang

melingkupinya, sehingga pendidikan Islam memiliki dimensi politik yang inheren. Persamaan karya Rofik Aksan dengan kajian penulis terletak pada pengakuan bahwa pendidikan Islam memiliki keterkaitan erat dengan politik. Namun, perbedaannya adalah Rofik Aksan lebih menitikberatkan pada relasi kekuasaan dan institusi pendidikan, sedangkan kajian penulis berfokus pada urgensi pendidikan politik Islam sebagai sarana pembentukan kesadaran politik umat.

Handoko, dalam karyanya yang berjudul *“Perkembangan Politik Islam dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam di Indonesia,”* mengkaji dinamika politik Islam dari masa ke masa serta dampaknya terhadap sistem dan orientasi pendidikan Islam. Ia menegaskan bahwa perubahan konfigurasi politik Islam di Indonesia berimplikasi langsung terhadap kebijakan, tujuan, dan peran pendidikan Islam dalam masyarakat (Handoko, 2022). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik dan ideologi. Persamaan karya Handoko dengan kajian penulis terletak pada pandangan bahwa pendidikan Islam memiliki fungsi strategis dalam membentuk kesadaran sosial umat. Adapun perbedaannya, Handoko lebih menekankan aspek historis perkembangan politik Islam, sementara kajian penulis menyoroti urgensi pendidikan politik Islam sebagai kebutuhan normatif dan aktual dalam kehidupan umat Islam.

Suwarin Rais Nusi, dalam tulisannya yang berjudul *“Aspek Politik, Sosial dan Budaya dalam Pendidikan Islam,”* membahas pendidikan Islam sebagai sistem yang dipengaruhi secara simultan oleh faktor politik, sosial, dan budaya. Ia menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik yang berkembang dalam masyarakat, serta tantangan globalisasi dan perubahan social (Nusi et al., 2024). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam harus bersikap adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Persamaan dengan kajian penulis terletak pada pengakuan bahwa aspek politik merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam. Namun, perbedaannya adalah Suwarin Rais Nusi membahas politik sebagai salah satu faktor eksternal pendidikan, sedangkan kajian penulis secara khusus menempatkan pendidikan politik Islam sebagai instrumen utama pembentukan kesadaran politik umat.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya tersebut, terdapat celah penelitian yang menjadi dasar penting bagi kajian ini. Pertama, belum banyak penelitian yang secara eksplisit membahas urgensi pendidikan politik dalam Islam sebagai kebutuhan mendasar umat di era modern. Kedua, masih terbatas kajian yang menempatkan pendidikan politik Islam sebagai proses edukatif yang sistematis dan berorientasi pada pembentukan kesadaran politik umat. Ketiga, integrasi antara nilai-nilai teologis Islam dan konsep pendidikan politik yang

kontekstual serta aplikatif masih belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif pendidikan politik Islam yang lebih komprehensif, normatif, dan relevan dengan dinamika politik kontemporer.

METODE PENELITIAN

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengkaji secara mendalam urgensi pendidikan politik dalam Islam berdasarkan sumber-sumber normatif dan kajian ilmiah yang relevan (Waruwu, 2024). Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai konsep, pandangan, serta temuan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan politik dan ajaran Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis memahami makna, nilai, dan relevansi pendidikan politik dalam Islam secara komprehensif, baik dari perspektif teologis maupun sosial-kontekstual.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan politik. Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pendidikan Islam, politik Islam, dan pendidikan politik. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengklasifikasikan tema, membandingkan konsep, serta menarik kesimpulan secara induktif. Validasi dan uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teori, yaitu membandingkan berbagai rujukan untuk memastikan konsistensi dan keabsahan argumentasi. Sistem penyusunan draf naskah dilakukan secara sistematis dan logis, dimulai dari pendahuluan, kajian literatur, metodologi penelitian, pembahasan, hingga penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Konsep Politik dalam Perspektif Islam

Politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kekuasaan, pengaturan masyarakat, dan penentuan arah bersama suatu komunitas (Amos Harita et al., 2025). Dalam perspektif Islam, politik tidak dipahami sekadar sebagai aktivitas perebutan kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan sosial dan kenegaraan. Oleh karena itu, politik dalam Islam memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat. Kekuasaan tidak berdiri bebas dari nilai, melainkan terikat oleh norma

ilahiah. Dengan demikian, praktik politik dalam Islam selalu diarahkan pada tujuan etis dan kemanusiaan.

Pandangan Islam terhadap politik berangkat dari konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi. Konsep ini menegaskan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah untuk mengelola kehidupan secara adil dan bertanggung jawab. Kekuasaan bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan sewenang-wenang, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan (Sulistiawati et al., n.d.). Perspektif ini membedakan politik Islam dari pandangan politik sekuler yang memisahkan urusan kekuasaan dari nilai transenden. Dalam Islam, dimensi spiritual justru menjadi pengontrol utama tindakan politik. Dengan demikian, orientasi politik Islam selalu berpijak pada prinsip tanggung jawab moral.

Landasan normatif politik Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini tidak merumuskan sistem politik secara teknis dan baku, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, dan amanah menjadi pedoman utama dalam mengelola kekuasaan. Sunnah Nabi menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik sosial dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa politik Islam bersifat normatif dan kontekstual sekaligus. Bentuk sistemnya dapat berubah sesuai zaman, tetapi nilai dasarnya tetap.

Salah satu prinsip paling fundamental dalam politik Islam adalah keadilan. Keadilan diposisikan sebagai tujuan utama dari penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan. Seorang pemimpin dituntut untuk menegakkan keadilan tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, maupun agama. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dimaknai secara legal formal, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dan penindasan dipandang sebagai bentuk kegagalan politik. Oleh sebab itu, kebijakan politik harus diarahkan untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara.

Selain keadilan, prinsip musyawarah memiliki peran penting dalam politik Islam. Musyawarah dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak secara kolektif. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam tidak menganut sistem kekuasaan yang otoriter dan absolut. Pemimpin tidak dibenarkan mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Musyawarah juga mencerminkan penghargaan Islam terhadap akal dan kebijaksanaan manusia. Dengan demikian, politik Islam menempatkan partisipasi publik sebagai elemen penting dalam pemerintahan.

Kepemimpinan dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah yang berat, bukan sebagai kehormatan atau privilese semata. Seorang pemimpin ideal

harus memiliki integritas moral, kecakapan intelektual, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepemimpinan yang sederhana, adil, dan dekat dengan masyarakat. Kekuasaan dijalankan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani umat. Prinsip ini menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan bersumber dari tanggung jawab dan keteladanan. Dengan demikian, politik Islam menolak kultus individu dalam kekuasaan.

Aspek hukum juga menempati posisi sentral dalam konsep politik Islam. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama hukum Islam adalah melindungi kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Politik berperan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan adil. Tanpa dukungan kekuasaan politik, hukum akan kehilangan efektivitasnya. Namun sebaliknya, kekuasaan juga tidak boleh memperlambat hukum demi kepentingan politik tertentu.

Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh bersikap pasif terhadap masalah kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. Sejarah peradaban Islam menunjukkan adanya institusi yang berfungsi untuk menjamin distribusi kekayaan secara adil. Hal ini mencerminkan bahwa politik Islam memiliki orientasi kesejahteraan yang kuat. Kekuasaan digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, politik Islam menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan utama kebijakan publik.

Politik Islam juga mengatur hubungan antarumat beragama secara adil dan toleran. Islam menjamin hak-hak non-Muslim yang hidup dalam masyarakat Islam selama mereka menaati kesepakatan sosial yang berlaku. Tidak ada paksaan dalam beragama, dan setiap individu berhak menjalankan keyakinannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa politik Islam bersifat inklusif dan menghargai pluralitas. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas kelompok minoritas. Sebaliknya, politik harus menjadi sarana menjaga keharmonisan sosial.

Dalam konteks modern, politik Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti demokrasi, negara bangsa, dan globalisasi. Para pemikir Muslim kontemporer berupaya merumuskan kembali konsep politik Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Upaya ini dilakukan melalui ijtihad yang berlandaskan nilai-nilai dasar Islam. Perbedaan pandangan di kalangan umat Islam menunjukkan dinamika pemikiran politik yang hidup. Hal ini menegaskan bahwa politik Islam tidak bersifat statis. Ia terus berkembang sesuai konteks sosial dan sejarah.

Keragaman penerapan politik Islam juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sejarah masing-masing masyarakat. Tidak terdapat satu model tunggal sistem politik yang diwajibkan dalam Islam. Selama nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan terwujud, berbagai bentuk pemerintahan dapat diterima. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam urusan politik. Islam tidak memaksakan bentuk, tetapi menekankan substansi nilai. Dengan demikian, politik Islam bersifat realistis dan adaptif.

2. Landasan Al-Qur'an dan Hadis tentang Kesadaran Politik Umat

Kesadaran politik umat merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan langsung dengan sikap, pilihan, dan tanggung jawab sosial individu terhadap kekuasaan dan kebijakan publik. Dalam Islam, kesadaran politik tidak lahir dari kepentingan pragmatis semata, melainkan berakar pada nilai-nilai keimanan dan moralitas. Politik dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadis memberikan landasan normatif yang kuat mengenai bagaimana umat bersikap terhadap kekuasaan dan urusan publik. Kesadaran politik dalam Islam diarahkan untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keteraturan sosial. Dengan demikian, politik menjadi sarana pengabdian, bukan sekadar arena persaingan.

Al-Qur'an memandang manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab kolektif dalam mengelola kehidupan bersama. Konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi menegaskan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga tatanan sosial dan politik. Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh penguasa, tetapi juga melibatkan partisipasi umat dalam mengawasi dan mengarahkan jalannya pemerintahan. Kesadaran politik dalam perspektif ini berarti memahami amanah sosial yang melekat pada setiap Muslim. Al-Qur'an mendorong umat untuk tidak bersikap apatis terhadap ketidakadilan. Dengan demikian, keterlibatan politik menjadi bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Salah satu landasan utama kesadaran politik dalam Al-Qur'an adalah perintah menegakkan keadilan. Keadilan disebut sebagai prinsip universal yang harus ditegakkan meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok (Rohmah & Yunus, 2024). Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dari kekuasaan dan hukum. Kesadaran politik umat tumbuh ketika mereka memahami bahwa diam terhadap kezaliman adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai keadilan. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk peka terhadap praktik ketidakadilan dalam kehidupan politik. Sikap kritis menjadi bagian dari implementasi nilai Qur'ani.

Selain keadilan, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai landasan kesadaran sosial dan politik. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam ranah moral individual, tetapi juga dalam kehidupan publik dan pemerintahan. Amar ma'ruf berarti mendorong kebijakan dan praktik politik yang membawa kebaikan bersama. Nahi munkar berarti menolak dan mengoreksi kebijakan yang menimbulkan kerusakan dan penindasan. Kesadaran politik umat tercermin dalam keberanian menyuarakan kebenaran secara bijaksana. Dengan demikian, politik tidak dibiarkan berjalan tanpa kontrol moral.

Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan publik. Prinsip musyawarah menunjukkan bahwa Islam menghargai partisipasi dan dialog dalam kehidupan sosial. Kesadaran politik umat terbangun ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah mencegah dominasi kekuasaan oleh segelintir pihak. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa urusan publik adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, umat Islam tidak didorong untuk pasif, melainkan aktif secara konstruktif.

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat landasan Al-Qur'an dalam membangun kesadaran politik umat. Nabi menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (Mj et al., 2025). Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab politik tidak hanya berada pada penguasa, tetapi juga pada rakyat. Kesadaran politik berarti menyadari peran masing-masing dalam menjaga keadilan dan keteraturan sosial. Nabi juga mengingatkan bahaya sikap masa bodoh terhadap urusan publik. Dengan demikian, kesadaran politik merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim.

Hadis-hadis Nabi juga menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam kekuasaan. Pemimpin yang menipu rakyat diperingatkan dengan ancaman moral dan spiritual yang serius. Pesan ini membentuk kesadaran politik umat agar tidak mudah menerima kepemimpinan yang zalim dan tidak amanah. Umat diajarkan untuk menilai pemimpin berdasarkan integritas, bukan sekadar popularitas. Kesadaran politik dalam konteks ini berarti memiliki standar etis dalam menentukan sikap politik. Dengan demikian, pilihan politik umat harus berlandaskan nilai, bukan emosi semata.

Dalam Hadis juga ditemukan penekanan pada kewajiban menasihati penguasa. Nasihat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial yang dilakukan dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kesadaran politik umat tercermin dalam keberanian menyampaikan kebenaran tanpa kekerasan dan provokasi. Nabi mencontohkan bahwa kritik terhadap kekuasaan harus bertujuan memperbaiki, bukan merusak. Prinsip ini menyeimbangkan antara

stabilitas sosial dan keadilan. Dengan demikian, politik dalam Islam diarahkan pada perbaikan berkelanjutan.

Al-Qur'an dan Hadis juga mengingatkan umat agar tidak terjebak dalam konflik dan perpecahan politik yang destruktif. Persatuan umat menjadi nilai penting yang harus dijaga dalam kehidupan politik. Kesadaran politik yang matang ditandai dengan kemampuan membedakan antara perbedaan pendapat dan permusuhan. Islam mengajarkan adab dalam perbedaan, termasuk dalam urusan politik. Dengan demikian, dinamika politik tidak boleh mengorbankan persaudaraan dan kemanusiaan. Politik harus dikelola dengan etika, bukan kebencian.

Dalam konteks modern, landasan Al-Qur'an dan Hadis tetap relevan dalam membentuk kesadaran politik umat. Tantangan seperti politik identitas, manipulasi informasi, dan pragmatisme kekuasaan menuntut umat memiliki pemahaman politik yang kritis dan bermoral. Nilai-nilai Qur'ani dan Nabawi menjadi pedoman untuk menyikapi realitas politik yang kompleks. Kesadaran politik tidak berarti fanatisme, tetapi kecerdasan moral dalam bersikap. Dengan demikian, ajaran Islam mampu memberikan arah dalam menghadapi dinamika politik kontemporer.

Kesadaran politik umat yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis juga mendorong keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Politik tidak dipandang sebagai sesuatu yang kotor, tetapi sebagai medan amal sosial. Umat Islam didorong untuk berkontribusi secara positif melalui partisipasi politik yang etis. Kesadaran ini menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap masa depan bersama. Dengan demikian, politik menjadi bagian dari ibadah sosial yang bernilai spiritual.

3. Pendidikan Politik sebagai Sarana Pembentukan Etika Kepemimpinan

Pendidikan politik merupakan aspek penting dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara karena berperan membentuk cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks kepemimpinan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang sistem dan proses politik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etis dalam menjalankan kekuasaan (Hasanah & Sulha, 2023). Tanpa pendidikan politik yang memadai, praktik kepemimpinan berpotensi terjebak pada pragmatisme dan kepentingan sesaat. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi sarana strategis untuk membangun kesadaran moral dalam kehidupan politik. Kepemimpinan yang etis tidak lahir secara instan, melainkan melalui

proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan politik memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter pemimpin.

Secara umum, pendidikan politik dipahami sebagai proses sistematis untuk meningkatkan pemahaman individu dan kelompok tentang hak, kewajiban, serta peran mereka dalam kehidupan politik. Pendidikan ini mencakup pengetahuan tentang nilai demokrasi, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Namun, pendidikan politik yang ideal tidak berhenti pada aspek kognitif semata. Ia juga harus menyentuh dimensi afektif dan moral peserta didik. Dalam konteks inilah pendidikan politik berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai etika kepemimpinan. Kesadaran akan tanggung jawab moral menjadi inti dari proses pendidikan tersebut.

Etika kepemimpinan merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang mengarahkan perilaku pemimpin dalam menjalankan kekuasaan. Etika ini mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan public (Salsabila & Fitriani, 2024). Pendidikan politik berperan menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini agar menjadi bagian dari karakter calon pemimpin. Tanpa landasan etika yang kuat, kekuasaan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu, pendidikan politik harus menekankan bahwa kepemimpinan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral. Dengan demikian, etika kepemimpinan menjadi tujuan utama pendidikan politik.

Dalam praktiknya, pendidikan politik yang berorientasi etika mengajarkan bahwa kekuasaan adalah sarana untuk melayani masyarakat. Perspektif ini penting untuk melawan budaya politik yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan akhir. Melalui pendidikan politik, individu diajak memahami dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat luas. Proses ini menumbuhkan empati dan kepekaan sosial pada calon pemimpin. Kesadaran tersebut mendorong pemimpin untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan. Dengan demikian, etika kepemimpinan tumbuh dari pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab sosial.

Pendidikan politik juga berperan dalam membentuk sikap kritis dan rasional terhadap kekuasaan. Sikap kritis ini penting agar calon pemimpin tidak terjebak dalam kultus individu atau otoritarianisme. Melalui diskusi, dialog, dan kajian kebijakan publik, pendidikan politik melatih kemampuan berpikir reflektif. Kemampuan ini membantu pemimpin mengevaluasi tindakannya sendiri secara etis. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya mencetak pemimpin yang cerdas, tetapi juga pemimpin yang mampu mengontrol diri. Etika kepemimpinan menjadi hasil dari kesadaran kritis tersebut.

Selain itu, pendidikan politik menanamkan nilai keadilan sebagai prinsip utama kepemimpinan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai upaya memperlakukan semua pihak secara setara. Pendidikan politik membantu calon pemimpin memahami kompleksitas keadilan sosial dalam masyarakat yang beragam. Pemahaman ini mencegah munculnya kebijakan yang diskriminatif. Dengan demikian, etika kepemimpinan yang adil dibentuk melalui pemahaman politik yang inklusif. Pendidikan politik menjadi jembatan antara nilai keadilan dan praktik kekuasaan.

Pendidikan politik juga berfungsi membangun integritas dalam kepemimpinan. Integritas mencakup konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Melalui pendidikan politik, individu diajak merefleksikan konsekuensi moral dari setiap pilihan politik. Proses refleksi ini memperkuat komitmen terhadap kejujuran dan transparansi. Pemimpin yang berintegritas akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik berkontribusi langsung terhadap terbentuknya kepemimpinan yang berwibawa secara moral. Dalam konteks demokrasi, pendidikan politik berperan penting dalam membangun kepemimpinan yang partisipatif. Pendidikan politik mengajarkan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sikap ini mencerminkan etika kepemimpinan yang menghargai martabat manusia. Pemimpin tidak diposisikan sebagai penguasa absolut, melainkan sebagai fasilitator kepentingan publik. Dengan demikian, pendidikan politik memperkuat hubungan etis antara pemimpin dan rakyat. Etika kepemimpinan tumbuh dari interaksi yang saling menghormati.

Pendidikan politik juga memiliki peran preventif terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pemahaman etika yang kuat, calon pemimpin lebih mampu menahan diri dari godaan kepentingan pribadi. Pendidikan politik menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kekuasaan. Nilai-nilai ini menjadi benteng moral bagi pemimpin. Dengan demikian, etika kepemimpinan yang terbentuk melalui pendidikan politik berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang bersih. Politik dipandang sebagai ruang pengabdian, bukan sarana keuntungan pribadi.

Dalam konteks sosial yang majemuk, pendidikan politik juga membentuk etika kepemimpinan yang toleran dan inklusif. Pemimpin dituntut memahami dan menghargai perbedaan pandangan, budaya, dan kepentingan. Pendidikan politik memberikan ruang untuk memahami pluralitas sebagai realitas sosial. Kesadaran ini mendorong pemimpin bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Etika kepemimpinan yang inklusif memperkuat persatuan sosial. Dengan demikian, pendidikan politik berperan menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa.

Seiring perkembangan zaman, pendidikan politik menghadapi tantangan berupa apatisisme politik dan pragmatisme kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan politik harus terus diperbarui agar relevan dengan realitas sosial. Pendekatan yang kontekstual dan partisipatif diperlukan untuk menanamkan nilai etika secara efektif. Pendidikan politik tidak boleh bersifat indoktrinatif, melainkan dialogis dan reflektif. Dengan demikian, pembentukan etika kepemimpinan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pendidikan politik menjadi proses dinamis yang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

4. Peran Pendidikan Politik Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Pendidikan politik Islam merupakan bagian penting dari upaya membangun tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Dalam Islam, politik tidak dipisahkan dari nilai moral dan tanggung jawab sosial, sehingga pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran umat terhadap keadilan sosial. Keadilan sosial dipahami sebagai kondisi di mana setiap individu memperoleh haknya secara proporsional dan bermartabat. Oleh karena itu, pendidikan politik Islam tidak hanya berorientasi pada pemahaman sistem kekuasaan, tetapi juga pada pembentukan sikap etis dalam kehidupan publik. Melalui pendidikan politik, umat diarahkan untuk memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menciptakan tatanan sosial yang adil. Dengan demikian, pendidikan politik Islam menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keadilan sosial.

Secara konseptual, pendidikan politik Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan nilai keadilan sebagai prinsip utama kehidupan (Maulana et al., 2024). Islam memandang keadilan bukan sekadar tujuan politik, melainkan kewajiban moral dan religius. Pendidikan politik Islam bertugas menanamkan pemahaman bahwa keadilan harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kesadaran ini membentuk sikap kritis umat terhadap ketimpangan dan penindasan. Dengan pemahaman tersebut, umat tidak bersikap pasif terhadap ketidakadilan. Pendidikan politik Islam mendorong keterlibatan aktif dalam memperjuangkan hak-hak sosial.

Landasan utama keadilan sosial dalam Islam adalah pengakuan terhadap martabat manusia. Pendidikan politik Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan nilai moral. Tidak ada legitimasi bagi diskriminasi berbasis status sosial, ekonomi, atau kelompok tertentu (Nasoha et al., 2025). Melalui pendidikan politik, umat dibekali kesadaran bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melindungi kelompok lemah. Prinsip ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan

masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik Islam memperkuat komitmen terhadap kesetaraan sosial.

Pendidikan politik Islam juga berperan dalam menanamkan prinsip amanah dalam pengelolaan kekuasaan. Kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebagai alat kepentingan pribadi. Pendidikan politik membentuk kesadaran bahwa pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Amanah menjadi nilai utama yang mencegah praktik korupsi dan ketidakadilan. Dengan memahami konsep ini, umat mampu menilai dan mengontrol perilaku pemimpin. Pendidikan politik Islam, dengan demikian, memperkuat akuntabilitas sosial dalam kehidupan politik.

Selain amanah, pendidikan politik Islam menekankan pentingnya musyawarah sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. Musyawarah memungkinkan berbagai aspirasi masyarakat terdengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan politik Islam mengajarkan bahwa kebijakan publik tidak boleh ditentukan secara sepihak. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan. Dengan musyawarah, keputusan politik lebih mencerminkan kebutuhan kolektif. Pendidikan politik Islam, oleh karena itu, mendorong keterlibatan aktif umat dalam proses politik.

Pendidikan politik Islam juga berfungsi membangun kesadaran kritis terhadap struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Umat didorong untuk memahami akar ketimpangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Pendidikan politik tidak hanya menjelaskan gejala ketidakadilan, tetapi juga mengajak mencari solusi berdasarkan nilai Islam. Kesadaran ini melahirkan sikap empati dan solidaritas sosial. Dengan demikian, pendidikan politik Islam menumbuhkan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Keadilan sosial dipahami sebagai tanggung jawab bersama.

Dalam konteks kebijakan publik, pendidikan politik Islam mengajarkan pentingnya orientasi kesejahteraan. Negara dan pemimpin dituntut memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan politik membentuk kesadaran bahwa keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa distribusi sumber daya yang adil. Prinsip ini menolak eksploitasi dan penumpukan kekayaan oleh segelintir pihak. Dengan pendidikan politik yang berlandaskan nilai Islam, kebijakan publik diarahkan pada kemaslahatan umum. Politik menjadi sarana pelayanan sosial.

Pendidikan politik Islam juga memiliki peran dalam menjaga persatuan sosial. Keadilan sosial sulit terwujud dalam masyarakat yang terpecah oleh konflik dan permusuhan. Pendidikan politik mengajarkan adab dalam perbedaan pendapat dan sikap toleran terhadap keberagaman. Kesadaran ini penting agar perjuangan keadilan tidak berubah menjadi konflik destruktif. Pendidikan politik

Islam menanamkan nilai persaudaraan dan solidaritas umat. Dengan demikian, keadilan sosial dibangun di atas fondasi persatuan.

Dalam konteks modern, pendidikan politik Islam menghadapi tantangan globalisasi, kapitalisme, dan politik identitas. Tantangan ini sering kali memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan solidaritas. Pendidikan politik Islam berperan membekali umat dengan kerangka nilai untuk menyikapi tantangan tersebut. Nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial menjadi pedoman dalam menghadapi dinamika global. Dengan pendidikan politik yang kuat, umat tidak mudah terjebak dalam pragmatisme politik. Keadilan sosial tetap menjadi orientasi utama.

Pendidikan politik Islam juga berkontribusi dalam membentuk generasi pemimpin yang berkomitmen pada keadilan sosial. Melalui pendidikan, calon pemimpin ditanamkan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Pemimpin tidak diposisikan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan masyarakat. Kesadaran ini penting agar kekuasaan digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, pendidikan politik Islam menjadi investasi jangka panjang bagi keadilan sosial. Kepemimpinan yang adil lahir dari pendidikan yang bermoral.

Peran pendidikan politik Islam tidak hanya terbatas pada ranah formal, tetapi juga berlangsung dalam keluarga, masyarakat, dan institusi keagamaan. Proses pendidikan ini membentuk budaya politik yang adil dan partisipatif. Kesadaran politik umat tumbuh melalui keteladanan dan pembiasaan nilai. Dengan pendidikan politik yang berkelanjutan, nilai keadilan sosial tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Politik tidak lagi dipandang sebagai arena kotor, melainkan sebagai ruang pengabdian. Pendidikan politik Islam menjadi motor perubahan sosial.

5. Tantangan dan Strategi Implementasi Pendidikan Politik Islam di Era Modern

Pendidikan politik Islam merupakan bagian penting dari upaya membangun kesadaran politik umat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Di era modern yang ditandai oleh perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang cepat, pendidikan politik Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Modernisasi membawa berbagai kemajuan, tetapi juga menghadirkan persoalan baru dalam kehidupan politik dan sosial umat Islam. Pendidikan politik Islam dituntut untuk mampu menjawab dinamika tersebut tanpa kehilangan substansi nilai ajarannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tantangan dan strategi implementasi pendidikan politik Islam menjadi semakin relevan. Pendidikan politik Islam harus mampu beradaptasi sekaligus menjaga prinsip-prinsip dasarnya.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan politik Islam di era modern adalah menguatnya sekularisasi dalam kehidupan politik. Pemisahan agama dari urusan publik menyebabkan nilai-nilai Islam sering dianggap tidak relevan dalam ranah politik (Dalmeri et al., 2022). Kondisi ini mempengaruhi cara pandang sebagian umat terhadap politik Islam. Pendidikan politik Islam menghadapi kesulitan dalam menanamkan kesadaran bahwa nilai agama dapat berjalan seiring dengan sistem politik modern. Tantangan ini diperparah oleh anggapan bahwa politik adalah wilayah yang kotor dan bertentangan dengan nilai religius. Oleh karena itu, strategi pendidikan politik Islam harus mampu menjelaskan hubungan integral antara nilai Islam dan kehidupan publik.

Tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya literasi politik umat. Banyak individu memahami politik secara sempit sebagai perebutan kekuasaan semata, tanpa memahami dimensi etis dan sosialnya. Rendahnya literasi ini membuat pendidikan politik Islam sulit diimplementasikan secara efektif. Umat cenderung apatis atau justru mudah terprovokasi oleh isu-isu politik yang bersifat emosional (Setiawan & Muhid, 2021). Pendidikan politik Islam perlu menghadapi realitas ini dengan pendekatan yang lebih edukatif dan dialogis. Dengan demikian, peningkatan literasi politik menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi pendidikan politik Islam.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menghadirkan tantangan tersendiri. Arus informasi yang cepat dan tidak terfilter sering kali menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi agama. Kondisi ini dapat merusak pemahaman umat terhadap nilai politik Islam yang moderat dan beretika. Pendidikan politik Islam harus mampu menghadapi tantangan digital ini dengan memberikan kemampuan literasi media kepada umat. Tanpa strategi yang tepat, pendidikan politik Islam berpotensi kalah oleh narasi politik yang manipulatif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi secara bijak menjadi kebutuhan mendesak.

Selain tantangan eksternal, pendidikan politik Islam juga menghadapi tantangan internal berupa perbedaan pandangan di kalangan umat Islam sendiri. Perbedaan mazhab, ideologi, dan pendekatan politik sering kali menimbulkan fragmentasi. Fragmentasi ini menyulitkan penyusunan kurikulum pendidikan politik Islam yang bersifat inklusif. Pendidikan politik Islam harus mampu menjembatani perbedaan tanpa menghilangkan prinsip dasar ajaran Islam. Strategi yang diperlukan adalah menekankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Dengan pendekatan ini, perbedaan dapat dikelola secara konstruktif.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari sistem pendidikan formal yang belum sepenuhnya mengintegrasikan pendidikan politik Islam secara komprehensif. Pendidikan politik sering kali dianggap sebagai isu sensitif atau sekunder. Akibatnya, pembahasan politik Islam kurang mendapat porsi yang memadai dalam kurikulum. Pendidikan politik Islam perlu diintegrasikan secara sistematis dalam pendidikan keagamaan maupun umum. Strategi ini bertujuan agar pemahaman politik Islam tidak bersifat sporadis, tetapi berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan formal menjadi sarana penting dalam implementasi pendidikan politik Islam.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, strategi utama implementasi pendidikan politik Islam adalah kontekstualisasi ajaran. Nilai-nilai politik Islam perlu dijelaskan dalam bahasa dan konteks yang sesuai dengan realitas modern. Pendekatan ini membantu umat memahami relevansi ajaran Islam dalam kehidupan politik kontemporer. Kontekstualisasi juga mencegah pemahaman yang kaku dan ahistoris. Dengan strategi ini, pendidikan politik Islam menjadi lebih aplikatif dan mudah dipahami. Nilai Islam tetap terjaga tanpa kehilangan daya adaptasinya.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan pendekatan partisipatif dalam pendidikan politik Islam. Pendidikan tidak boleh bersifat satu arah dan indoktrinatif. Dialog, diskusi, dan refleksi kritis perlu menjadi metode utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran politik yang matang dan bertanggung jawab. Umat diajak untuk berpikir kritis tanpa kehilangan komitmen nilai. Dengan demikian, pendidikan politik Islam mampu membentuk sikap politik yang etis dan dewasa.

Pemanfaatan media digital secara strategis juga menjadi langkah penting dalam implementasi pendidikan politik Islam di era modern. Media sosial dan platform digital dapat digunakan sebagai sarana penyebaran nilai politik Islam yang moderat dan konstruktif. Pendidikan politik Islam perlu hadir di ruang-ruang digital yang banyak diakses oleh generasi muda. Konten yang edukatif, naratif, dan mudah dipahami menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Dengan cara ini, pendidikan politik Islam tidak tertinggal oleh arus informasi digital. Teknologi menjadi alat, bukan ancaman.

Peran lembaga keagamaan dan tokoh agama juga sangat strategis dalam implementasi pendidikan politik Islam. Mereka memiliki legitimasi moral dan kepercayaan dari masyarakat. Melalui khutbah, pengajian, dan kegiatan sosial, nilai-nilai politik Islam dapat disampaikan secara efektif. Tantangannya adalah memastikan bahwa pesan yang disampaikan bersifat edukatif, bukan provokatif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tokoh agama dalam literasi politik

menjadi kebutuhan penting. Dengan strategi ini, pendidikan politik Islam dapat menjangkau lapisan masyarakat yang luas.

Selain itu, pendidikan politik Islam perlu menekankan pembentukan etika politik sebagai tujuan utama. Fokus pendidikan tidak hanya pada pengetahuan politik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus menjadi inti pembelajaran. Strategi ini penting untuk mencegah politisasi agama yang destruktif. Dengan etika politik yang kuat, umat mampu bersikap bijaksana dalam menghadapi dinamika politik. Pendidikan politik Islam berfungsi sebagai penuntun moral.

KESIMPULAN

Pendidikan politik dalam Islam memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membentuk kesadaran politik umat yang beretika, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan politik Islam berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial ke dalam kehidupan politik. Melalui pendidikan politik yang berlandaskan ajaran Islam, umat diarahkan untuk memahami politik bukan sebagai arena pragmatis semata, melainkan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan politik Islam menjadi jawaban atas persoalan rendahnya literasi politik dan lemahnya orientasi moral umat dalam menghadapi dinamika politik kontemporer.

Selain itu, pendidikan politik dalam Islam juga menjadi solusi terhadap kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dan realitas praktik politik yang sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan dan politisasi agama. Pendidikan politik Islam mendorong terbentuknya sikap politik yang inklusif, partisipatif, dan berkeadaban, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif umat untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik secara konstruktif. Dengan pendekatan yang edukatif dan bernilai moral, pendidikan politik Islam mampu memperkuat etika politik serta membangun budaya politik yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik dalam Islam menjadi kebutuhan mendesak bagi terciptanya kehidupan politik umat yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.

REFERENSI

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hanifah Miftahul Jannah, Viky Fatimah, & Nurul Fadilah. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kurikulum Pendidikan. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(2), 40–59. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i2.889>

- Ahmad Reza Maulana, Arga Sabda Wiguna, Muhammad Fajriansyah Solichin, & Muhammad Reza Syahbudi. (2024). Islamic Education And Democracy: Harmonizing Faith And Civic Engagement. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 185–199.
<https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.141>
- Aksan, R. (2022). Kekuasaan dan Politik Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 10(1), 17. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i1.6898>
- Amos Harita, Ismaidar Ismaidar, & Tamaulina Br Sembiring. (2025). Politik Hukum dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 20–26.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2111>
- Dalmeri, D., Parhan, M., Hilmiyah, A., Bastiar, R. D. N., Wiyana, R., Balqissa, S., & Fatima, S. N. (2022). Sekularisme sebagai tantangan pendidikan Islam kontemporer. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 222–239.
<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i2.7193>
- Handoko, H. (2022). Perkembangan Politik Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *journal Ta'limuna*, 11(1), 21–30.
<https://doi.org/10.32478/talimuna.v11i1.958>
- Hasanah, S. U. & Sulha. (2023). Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Sebagai Pemilih Pemula Di Kota Singkawang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 44–56.
<https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7475>
- Mj, J., Askar, R. A. B., & Suparta, M. (2025). Dasar Kepemimpinan Pendidikan Agama Islam Dalam Al-. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
<https://doi.org/10.61166/kasyafa.v2i2.75>
- Nusi, S. R., Yahiji, K., Ondeng, S., Solong, N. P., & Gorontalo, I. S. A. (2024). Aspek Politik, Sosial Dan Budaya Dalam Pendidikan Islam. *Educator*, 5(2), 87–105.
<https://doi.org/10.58176/edu.v5i2.1598>
- Rohmah, S. N., & Yunus, N. R. (2024). Terminology of Justice in the Quran On the Dimensions of Constitutional Law. *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, 8(1).
<https://doi.org/10.15408/adalah.v8i1.39010>

- Salsabila, D., & Fitrani, Z. Z. (2024). Implementasi Etika Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Tantangan Dan Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance. *Open Access*, 6(6).
<https://doi.org/10.6578/triwikrama.v6i6.9403>
- Setiawan, W., & Muhid, A. (2021). Pengaruh Media Terhadap Pendewasaan Politik Umat Islam: Literatur Review. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 5(1), 73.
<https://doi.org/10.24853/pk.5.1.73-85>
- Sulistiawati, A. N., Amanda, R. L., Rahmawati, T., & Any, P. A. (n.d.). Good Governance dalam Islam: Kepemimpinan dalam Islam. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2).
<https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.947>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>